

# REFLEKSI AKHIR TAHUN 2015

---

“ Introspeksi untuk kinerja yang lebih **PASTI**”

# PENGANTAR

- ❑ Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi yang membidangi urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia, memegang peranan yang strategis. Dengan dukungan **836 satuan kerja** yang tersebar di dalam dan di beberapa perwakilan luar negeri, serta didukung sumber daya manusia sebanyak **44.460 Aparatur Sipil Negara** serta dukungan anggaran sebesar **Rp. 11,180,287,701,000**, Kementerian Hukum dan HAM “**SIAP**” melaksanakan mandat yang strategis tersebut secara jelas dan terukur, guna mewujudkan visi Kementerian yaitu “**Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum**”.
- ❑ Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kementerian hukum dan HAM menekankan pada orientasi masa depan Kementerian dengan mengacu kepada kompetensi inti (*core bussines*) Kementerian Hukum dan HAM yakni fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, dan misi yaitu mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas, mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas, Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM, mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas dalam semangat "**Kami PASTI**".

# CAPAIAN KINERJA 2015

## ❑ REALISASI ANGGARAN 2015 (data SPAN per 28 Desember 2015)

Sampai dengan tanggal 28 Desember 2015, Kementerian Hukum dan HAM telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp. 8,529,017,164,649** atau sebesar **76 %**.

## ❑ REALISASI KEGIATAN 2015

### Bidang Pembentukan Hukum

- Review Status dan kedudukan produk hukum kolonial setelah 70 tahun Indonesia merdeka
- Harmonisasi 204 peraturan perundang-undangan
- Penyelarasan 26 Rpermen disemua K/L
- Uji publik KHUP, RUU Merek, RUU Paten
- Penyelarasan naskah akademik prioritas prolegnas 2016 diseluruh K/L melibatkan multy stakeholders
- Litigasi 15 Peraturan perundang-undangan
- Fasilitasi 106 perda

### Bidang Penegakan hukum, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM

- Rehabilitasi narapidana kasus narkoba di 62 Lapas
- Penempatan dan pembatasan komunikasi napi dan tahanan bandar narkoba
- Pemantauan narapidana high risk secara online
- Operasionalisasi 118 Outlet Produk napi
- Terbentuknya 39 LPKA/LPAS
- Penegakan Hukum keimigrasian, projustia 123 orang, pencegahan 803 orang, penangkapan terhadap WNA 5.426 orang, Deportasi 9.481 orang
- Penerapan sistem pengawasan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing , penegakan Hukum keimigrasian, projustia 123 orang, pencegahan 803 orang, penangkapan terhadap WNA 5.426 orang, Deportasi 9.481 orang (APOA).
- Operasi pengawasan orang asing secara serentak di seluruh Indonesia
- Penyelenggaraan masyarakatan berbasis HAM

## **Bidang Administratif Fasilitatif**

- Penataan tugas dan fungsi kesekretariatan serta proses bisnis termasuk keseragaman nomenklatur untuk eselon III dan IV pada setiap unit kerja eselon I.
- Dibentuk fungsi baru yang menangani teknologi informasi secara terpusat setingkat eselon II yang khusus menangani teknologi informasi yang berada dibawah Sekretariat Jenderal.
- Penataan kembali dan pengintegrasian secara terpadu fungsi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM kedalam satu unit kerja eselon I agar tidak terdapat tumpang tindih dan duplikasi pekerjaan menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
- Penguatan peran dan pembinaan perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Kantor Wilayah;
- Penataan dan perubahan nomenklatur pada beberapa unit eselon I ;
- Penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pemasarakatan .

## **Bidang Sumber Daya Manusia**

- Penilaian Prestasi Kinerja PNS Online
- Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 50 (lima puluh) jenis penyelenggaraan diklat baik melalui diklat klasikal, e-learning diikuti oleh 1.621 orang.
- Penilaian kompetensi dengan metode Computer Assisted Test (CAT) pada 13 (tiga belas) Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dari 2.700 orang yang direncanakan dilakukan penilaian kompetensi 95,67% atau 2.583 orang.

## **Peningkatan Kualitas Pengawasan**

- Tersedianya unit layanan pengaduan masyarakat antara lain: SMS Gateway, email, Kotak Pos PO BOX 3489 , Website WBS dan aplikasi LAPOR.
- Implementasi Inpres 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015, khususnya aksi substansi terkait peraturan perundangan, administrasi hukum umum, pmasarakatan, imigrasi, dan peran pengawasan.
- Terbangunnya aplikasi portal data dan informasi untuk memberikan gambaran kepada pimpinan terkait capaian kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

## ❑ PENGHARGAAN EKSTERNAL

1. Penganugerahan Apresiasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015, dengan judul inovasi: Pengesahan Badan Hukum Versi AHU Online. (posisi 3 besar)
2. Diterimanya penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Tahun 2014 dan Tahun 2015.
3. Disamping pelaksanaan Kompetisi Inovasi, Kementerian PANRB juga mengirimkan inovator untuk mengikuti United Nations Public Service Awards (UNPSA) di tingkat PBB. TOP 40 dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 akan diikuti pula pada UNPSA Tahun 2016, hal ini berarti “Pengesahan Badan Hukum Versi AHU Online, Kementerian Hukum dan HAM” bersaing di tingkat internasional.
4. Terbaik I (Pertama) Implementasi Rekrutmen ASN Berbasis Teknologi Informasi K/L dan Non Kementerian.
5. Posisi 2 (*runner up*) kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik Bagi Kementerian /Lembaga.
6. Terbaik I (Pertama) National *Procurement Award* Pada Kategori Pemenuhan terhadap Standar LPSE.
7. Peringkat II (Kedua) LPSE Award Pada Kategori Kepemimpinan Dalam Transformasi Pengadaan Secara Elektronik.
8. Harapan II penghargaan Efisiensi Energi Nasional ke-4 Tahun 2015, untuk kategori Penghematan Energi Dan Air Pemerintah Pusat Dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI.
9. Penghargaan dari BKN sebagai Kementerian yang Konsisten Menggunakan Metode Computer Assisted Test BKN dalam Pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015.
10. Apresiasi dari Museum Rekor “MURI” atas penyediaan sumur sebagai sarana air bersih di tengah musim kemarau panjang yang terjadi sampai dengan bulan Oktober 2015 sebanyak 275 unit di beberapa lokasi di seluruh provinsi yang mengalami kekurangan air bersih.
11. Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2019 dari Ombudsmen Republik Indonesia kepada 16 Kantor Imigrasi.
12. Hasil evaluasi dari Kemenpan dan RB, atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015, Kementerian Hukum dan HAM memperoleh Predikat B.

# TANTANGAN

## ❑ SUMBER DAYA MANUSIA

- Tingkat penyebaran pegawai Kementerian Hukum dan HAM di tingkat pusat dan daerah belum seimbang. Masih diperlukan penataan SDM untuk petugas masyarakat dan petugas imigrasi di beberapa unit pelaksana teknis yang mengalami over kapasitas.
- Masih diperlukan peningkatan kapasitas bagi tenaga penyusun dan perancang perundangan, mengingat core bisnis Kementerian Hukum dan HAM adalah fasilitasi penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan .
- Masih diperlukan penambahan jumlah tenaga pembimbing masyarakat (PK) Bapas atas mandat UU Sistem Pidana Peradilan Anak.

## ❑ INFRASTRUKTUR

- Masih diperlukan penataan ulang terkait penempatan warga binaan masyarakat, untuk memecah titik over kapasitas di beberapa unit pelaksana teknis masyarakat.
- Diperlukan penambahan beberapa gedung untuk LPKA Anak atas mandat Undang-undang SPPA.

## ❑ STANDAR PELAYANAN PROSEDUR

Diperlukan evaluasi menyeluruh atas SOP yang telah diterapkan di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya SOP pelayanan publik baik masyarakat, imigrasi, AHU, dan KI agar tidak terulang kembali hal-hal yang tidak diinginkan.

## ❑ DAYA SERAP ANGGARAN

Diperlukan kemampuan manajerial dan skill yang bagus untuk melakukan percepatan secara akuntabel dalam merealisasikan anggaran dengan baik dan benar.

## Selamat Tinggal 2015

- Pada akhirnya kita telah sampai pada bagian akhir dari tahun 2015.
- Bukan berarti kita telah sukses menyelesaikan seluruh tugas dengan tuntas.
- Akhir Tahun 2015 menjadi sebuah introspeksi bagi kita bersama atas kegagalan, hambatan dan kendala yang belum kita tuntaskan.
- Bersama kita bulatkan tekad untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

**Jakarta, 31 Desember 2015**  
**Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**  
**Republik Indonesia**

**Yasonna H. Laoly**